

BAB II

SEKILAS BIOGRAFI DAN LATAR BELAKANG INTELEKTUAL

NICOLAUS DRIYARKARA

2.1 Sekilas Biografi Nicolaus Driyarkara

2.1.1 Sekilas Riwayat Hidup

Nicolaus Driyarkara dilahirkan di lereng pegunungan Menoreh, tepatnya di desa Kedunggubah, Jawa Tengah 13 Juni 1913. Ia dibaptis dengan nama Nicolaus Djentoe Soehirman pada tanggal 22 Desember 1925.¹⁷ Barulah kemudian memasuki Girisonta pada tahun 1935, memulai hidup baru dalam Serikat Yesus, ia mengambil nama Driyarkara.¹⁸ Ia dilahirkan sebagai anak bungsu dari empat orang bersaudara dari keluarga Admasendjaja. Sejak kecil ia dipanggil Djenthu, yang berarti kekar dan gemuk.

Kondisi pendidikan di Kedunggubah amat memprihatinkan. Beberapa warga desa ini menyatakan, pendidikan di sini tidak banyak berkembang dari dulu hingga sekarang. Sekolah Dasar (SD) berdiri di wilayah ini sekitar 1976. Sekolah

¹⁷ A. Sudiarja, dkk (ed.), *Karya Lengkap Driyarkara*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. xix-xxiii.

¹⁸ A. Sudiarja, dkk (ed.), *Ibid.*, hlm. xx. Usai menyelesaikan belajar di seminari, Djenthu memilih menjadi pengikut St Ignatius Loyola. Ia masuk menjadi novisiat Serikat Yesus di Girisonta, Semarang. Saat menjalani novisiat ini Djenthu mengubah namanya menjadi "Driyarkara". Kala itu, Novisiat Serikat Yesus memiliki tradisi mengganti nama sebagai bentuk ungkapan batin, meninggalkan masa lalu dan berharap lahir menjadi manusia baru. "Driyarkara" merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "Driya" yang berarti mata dan "Kara" yang berarti sinar cahaya atau tajam. Nampaknya Djenthu memilih nama ini bukan sembarangan. Ia berharap menjadi pribadi yang memiliki penglihatan tajam pada segala gejala serta dapat menerangi banyak hal laksana sinar yang tajam. Dari pilihan nama, Djenthu sudah melihat, bahwa filsafat adalah jalan hidupnya.

menengah tidak ada, sehingga anak-anak harus menempuh jenjang pendidikan menengah ke Purworejo. Djenthu kian tumbuh dan besar di Kedunggubah. Alam pedesaan yang masih asri, membentuk Djenthu menjadi pribadi yang bersahabat. Setelah menyelesaikan belajar di *Volksschool* atau Sekolah Rakyat di Cangkreng, Purworejo, Djenthu melanjutkan ke *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) Purworejo dan Malang. Di sinilah, Djenthu mulai berkenalan dengan agama Katolik. Ia bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, karena mengalir “darah biru” dalam tubuhnya. Kakak ayahnya yang bernama Raden Wirjasendjaja adalah seorang *glondhong* atau kepala beberapa lurah yang dihormati di tempatnya.

Benih-benih panggilan pun tumbuh dalam hati Djenthu. Ia ingin mengabdikan dirinya untuk Tuhan dan sesama. Ia pun memutuskan masuk Seminari Mertoyudan tahun 1929. Kecakapan dan kecerdasan Djenthu kian terasah. Ia pernah mendapat penghargaan karena memberi nama “Aquila”, yang berarti rajawali kepada majalah di Seminari Mertoyudan yang masih hidup sampai sekarang. Setelah menempuh pendidikannya di sini, ia beralih ke pendidikan tinggi dari tarekat religius yakni Serikat Jesus. Dua tahun sekolah *ascetika* (kehidupan rohani), satu tahun *humaniora* (bahasa Latin, Yunani Kuno serta sejarah kebudayaan Barat dan Timur) sebagai permulaan untuk studi filsafat. Sesudah itu, selama tiga tahun ia belajar di Sekolah Tinggi Filsafat di Yogyakarta yang disebut Ignatius College. Di sini, Driyarkara ditugaskan mengajar filsafat. Selama pendudukan Jepang dan dua tahun lagi, yaitu sampai pertengahan tahun 1947, ia menjadi dosen pada Seminari Tinggi Yogyakarta. Sementara pada waktu

yang sama ia banyak belajar teologi secara otodidak untuk mempersiapkan diri ditahbiskan menjadi imam. Tahbisan imamnya diberikan oleh Mgr. Soegijapranata SJ, tanggal 6 Januari 1947. Driyarkara pun lalu ditugaskan studi teologi di Maastricht, Belanda. Dengan berat hati, tidak tanpa pergumulan batin, hanya demi ketaatan, ia berangkat pada tanggal 24 Juli 1947. Dua tahun ia belajar di sana, lalu menuju Belgia untuk meneruskan pelajaran tentang kehidupan rohani. Pada tahun 1950, Driyarkara mendapat kepercayaan untuk melanjutkan studi filsafat program doktoral di Roma pada Universitas Gregoriana.¹⁹ Disertasi doktoralnya berjudul *Participationis Cognitio in Existentia di Parcienda Secundum Malebranche Utrum Partem Habent*,²⁰ (Peranan Pengertian Partisipasi dalam Pengertian Tuhan Menurut Malebrance). Sekembalinya ke tanah air ia mengajar di Ignatius College sebagai pengajar filsafat. Selama satu dekade kemudian, Driyarkara telah menjadi guru besar Luar Biasa pada Universitas Indonesia dan Hassanuddin. Tahun 1963-1964, ia menjadi Guru Besar tamu di St. Louis University, Missouri, USA. Ia pun pernah menjabat sebagai anggota MPRS. Pernah pula sebagai Dewan Pertimbangan Agung. Ia akhirnya meninggal di Girisonta, Ungaran, Jawa Tengah, 11 Februari 1967 dalam usia 53 tahun.²¹

2.1.2 Sekilas Karya-Karya

Driyarkara sendiri tidak menulis sebuah buku pun dalam arti yang sesungguhnya. Adalah disertasi sebuah pengecualian. Namun, dari Romo

¹⁹ *Ibid.*, hlm. xx-xxi.

²⁰ *Ibid.*, hlm. xxi.

²¹ *Ibid.*

Fransiskus Danuwinata, SJ²² dapat kita ketahui pemikiran Driyarkara yang dikumpulkan pada rapat pertama para pemrakarsa penerbitan karya-karya Driyarkara di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tanggal 10 Mei 2005.

Karya Driyarkara yang dikumpulkan itu ialah sebuah disertasi yang berjudul: *Participationis Cognitio in Existentia di Parcienda Secundum Malebranche Utrum Partem Habent*,²³ (Peranan Pengertian Partisipasi dalam Pengertian Tuhan Menurut Malebrance), sebuah disertasi doktoral filsafat dari Universitas Gregoriana, Roma, tahun 1953. Disertasi ini setebal 300 halaman ditulis dalam bahasa Latin. Diterjemahkan oleh P. Tom Yakob, SJ.

Selanjutnya buku-buku lain yang semula merupakan bahan ajar tetapi juga terdapat kumpulan karangan (dengan ratusan karya) yang telah dibukukan. Buku-buku itu adalah sebagai berikut:

Buku *Pertjikan Filsafat* (Jakarta: Pembangunan, 1964); Buku *Filsafat Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1979); Buku *Driyarkara tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1978); Buku *Driyarkara tentang Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1978); Buku *Driyarkara tentang Negara dan Bangsa*, (Yogyakarta: Kanisius, 1978); *Driyarkara tentang Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1978); Kumpulan karangan, *Alm. Prof. Dr. Nicolaus Driyarkara, SJ* (Yogyakarta: Kanisius, 1980); Buku *Pancasila sebagai Ideologi*, (Yogyakarta: Pendidikan

²² Romo Danu adalah sahabat dan guru N. Driyarkara di umur 80 tahun melakukan napak tilas atas seluruh karya Driyarkara. Beliau lah yang dengan gigih melakukan pengumpulan atas karya Driyarkara baik lisan maupun tulisan. Dialah satu-satunya narasumber, saksi mata dan murid kesayangan atas usaha istimewa ini demi penghargaan dan dedikasi kepada nama besar seorang guru yang nyaris ditelan zaman.

²³ A. Sudiarja, dkk (ed.), *Karya Lengkap Driyarkara, Op. Cit.*, hlm. xxi.

Paramitha, 1968); Buku *Pembimbing Filsafat ke Filsafat dan Logika Formal*, (Yogyakarta: de Brito, tanpa tahun).²⁴ Adapun sebuah kumpulan tulisan tangan Driyarkata yang telah dibukukan adalah *Diarium*.²⁵

2.2 Pemikiran Para Filsuf

2.2.1 Plato (427-347 SM)

Plato lahir pada tahun 428 atau 427 SM dalam satu keluarga terkemuka di Athena. Plato dididik dalam rumah Pyrilampes (paman yang menikahi ibunya) seorang politikus yang termasuk dalam kalangan perikles. Sejak masa mudanya ia bergaul dengan tokoh-tokoh yang memainkan peranan penting dalam politik Athena. Saudara ibunya, Harmides dan kemenakan ibunya Kritias termasuk dalam kelompok 30 *Tyranoi* yang memerintah Athena dengan kejam (404-403).²⁶

Pada awalnya ia berniat terjun ke dunia politik praktis tetapi kemudian dibatalkan karena kelompok yang mengajaknya untuk berpolitik memerintah dengan kejam. Kelompok ini memeralat Sokrates gurunya untuk menangkap orang yang tidak bersalah dengan tuduhan palsu agar dapat menyita kekayaannya. Tetapi usaha ini gagal karena terlebih dahulu digulingkan kelompok demokrasi. Tampilnya kaum demokrat untuk memulihkan situasi ternyata tidaklah murni. Kaum demokrat pun menginginkan kematian Sokrates. Insiden penghukuman

²⁴ *Ibid.*, hlm. 1447.

²⁵ Catatan harian atau *Diarium* (Lat. *Dies*: hari, harian) ditulis pada akhir belajar filsafat yakni tanggal 1 Januari 1941 sampai dengan 2 April 1950 dalam bahasa Belanda, Latin, Jawa, Indonesia, Inggris dan Jerman. Pada waktu itu, usianya masuk ke-28 tahun, tahun-tahun terakhir menjalani panggilan sebagai calon imam Jesuit kelak menjadi imam (6 Januari 1947) yang merupakan permenungan pribadi dan juga sebagai latihan pengendalian diri, kadang berhasil-kadang gagal. Buku masih terawat baik oleh seorang muridnya P. Danuwinata. *Ibid.*, hlm. 51.

²⁶ K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hal. 115.

mati terhadap orang yang dikaguminya memudarkan semangatnya untuk berpolitik praktis.²⁷

Ajaran Plato tentang *negara* ditulis pada waktu kehidupan politik Yunani merosot. Pemerintahan negara menjadi rebutan orang-orang yang tidak memenuhi syarat, tetapi berambisi. Plato mempunyai pengalaman buruk dengan bentuk negara demokratis, yang berdasarkan pemungutan suara terbanyak telah membunuh Sokrates. Guru dan sahabatnya ini, yang secara “demokratis” dinyatakan bersalah dengan mayoritas 60 suara (280 melawan 220) dalam pengadilan rakyat di Athena, dituntut hukuman mati. Pengalaman buruk ini yang mendorong Plato untuk memikirkan suatu negara yang lebih baik daripada sebelumnya. “Semua negara sekarang ini diperintah secara buruk,” kata Plato.

Dalam *Politeia*, Plato mencita-citakan suatu polah kehidupan kenegaraan yang baik. Kehidupan itu akan tercapai bila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Menurut Plato, keadilan adalah keadaan selaras dan seimbang berbagai tatanan atau lapisan masyarakat. Masyarakat adil adalah masyarakat yang dipersatukan oleh tatanan harmonis di mana tiap-tiap anggota memperoleh kedudukan sesuai kodrat, tingkat pendidikan, atau profesinya. Sebagaimana manusia akan sehat dan utuh apabila semua bagian jiwanya berada dalam hubungan selaras satu sama lain, begitu pula halnya polis.²⁸ Konsepsi Plato tentang negara mempunyai satu visi yang penting yaitu demi kepentingan umum

²⁷ Edith Hamilton and Huntington Cairns, (ed.), *The Collected Dialogues Of Plato, Including The Letters*, (New Jersey: Princeton University, 1989), hlm. 1575.

²⁸ Simon Petrus L. Tjahjadi, *Op. Cit.*, hlm. 56-57.

yang harus diutamakan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat negara. Mereka yang memerintah pun harus mengorbankan kepentingan pribadi.²⁹

Dengan pandangan semacam itu, Plato dapat membangun suatu model negara. Dalam negara terdapat tiga golongan, yakni (1) golongan penjamin nafkah, (2) para penjaga, dan (3) para pemimpin. Golongan pertama adalah kelompok yang bekerja agar barang kebutuhan manusia dapat tersedia (para petani, tukang, pedagang, buruh, pengemudi, dan pelaut). Golongan kedua, yakni golongan penjaga, adalah para pengawas dan pengatur golongan pertama agar tidak hanya memikirkan kepentingannya. Golongan kedua ini seluruhnya harus mengabdikan kepada kepentingan umum. Maka, mereka perlu dikondisikan agar di antara mereka tidak berkembang berbagai kepentingan pribadi. Mereka tidak boleh berkeluarga, wanita dimiliki bersama, anak-anak diurus negara, mereka tidak punya hak milik pribadi, mereka hidup, makan, dan tidur bersama. Mereka perlu dididik secara intensif sejak umur dua tahun dengan konsentrasi pada mata pelajaran yang mengembangkan disiplin dan kebijaksanaan (gimnastik, filsafat, dan seni musik).³⁰ Pada umur tiga puluh tahun, orang akan diuji dengan ketat, dalam rangka memilih penjaga-penjaga baru. Mereka yang terpilih akan belajar filsafat selama lima tahun dan kemudian akan menjadi abdi negara yang bekerja untuk negara selama lima belas tahun berikutnya. Pada umur lima puluh tahun orang akan menjadi penjaga-penjaga, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Para penjaga ini akan hidup sederhana dan secara umum tanpa uang dan hanya

²⁹ Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat I*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 46.

³⁰ Simon Petrus L. Tjahjadi, *Op. Cit.*, hlm. 57.

dengan milik pribadi yang minim. Ini untuk menghindarkan kepentingan diri. Para penjaga dapat menjadi bahagia, tetapi mereka harus memerintah demi kebaikan seluruh masyarakat dan bukan untuk kepentingan kelompok mereka. Negara harus mempunyai empat kualitas utama, yaitu kebijaksanaan, keberanian, disiplin, dan keadilan.³¹

Para pemimpin negara diambil dari antara para penjaga, dari mereka yang mendalami filsafat. Itulah paham termasyhur Plato tentang pemimpin negara harus seorang filsuf. Filsuf adalah orang yang sanggup untuk melihat idea-idea atau hakikat-hakikat rohani di belakang bayangan-bayangan alam indrawi yang beubah-ubah. Hal itu mungkin karena ia telah mengatasi keterikatan pada nafsu dan indera dan dengan demikian bebas dari pamrih. Seorang filsuf dapat memimpin masyarakat dengan berorientasi pada idea metafisik tertinggi, idea kebaikan.³²

2.2.2 Aristoteles (384-322 SM)

Aristoteles merupakan murid Plato yang paling masyhur. Sesudah belajar dalam sekolah Plato ia merantau di Asia Kecil dan Macedonia. Di Macedonia ia menjadi pendidik seorang putra raja, yakni pangeran Aleksander Agung. Sesudah tugas ini selesai ia mendirikan suatu sekolah baru di Athena, yakni *Lukeion* (Liceum). Di sana ia mengajar, mengadakan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dan menulis banyak buku. Karena pergolakan politik sesudah

³¹ Hardono Hadi (perj), *Ide-ide Filsafat Dan Agama Dulu Dan Sekarang*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 107.

³² Franz Magnis-Suseno, *Op. Cit.*, hlm. 229.

kematian Aleksander ia harus lari dari kota Athena.³³ Waktu mudanya Aristoteles menganut filsafat Plato, tetapi lama-kelamaan dibangunnya filsafat sendiri. Bukunya yang ditulisnya adalah antara lain; *Logika, Phisika, Metaphisika, Etika Nicomacheia*. Tentang negara dan hukum ditulisnya: *Politika* (8 buku).³⁴

Aristoteles membahas polis dalam rangka permasalahan tentang tujuan manusia.³⁵ Tujuan terakhir manusia adalah kebahagiaan (*eudaimonia*), karena hanya kebahagiaan diusahakan demi dirinya sendiri, sedangkan bagi orang yang sudah bahagia tak ada sesuatu lagi yang dirindukannya. Tetapi, manusia adalah makhluk sosial (*zoon platikon*). Sendirian ia hanya dapat sekedar mempertahankan nyawanya saja (*zen*). Untuk hidup dengan baik (*euzen*), artinya sebagai manusia yang beradab, yang dapat mengembangkan potensi-potensinya, ia membutuhkan negara sebagai tatanan kehidupan bersama manusia dalam satu masyarakat. Dari situ Aristoteles menarik kesimpulan bahwa tujuan negara adalah sama dengan tujuan manusia: agar manusia mencapai kebahagiaan. Maka, negara bertugas untuk mengusahakan kebahagiaan para warganya.³⁶

Dengan melawan Plato, Aristoteles tidak menyerahkan kepemimpinan negara kepada seorang filsuf. Baginya filsafat sibuk dengan hal-hal abadi yang tak berubah, sedangkan politik menyangkut manusia yang selamanya berubah-ubah. Yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin masyarakat adalah kebijaksanaan dalam pergaulan dan keutamaan-keutamaan etis. Sikap-sikap itu tidak merupakan objek

³³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 25.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 26.

³⁵ Franz Magnis-Suseno, *Op. Cit.*, hlm. 229.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 230.

pengetahuan filosofis melainkan tumbuh dalam keakraban dengan yang baik, dalam berulang-ulang melakukannya.³⁷

Tentang bagaimana negara harus diatur, Aristoteles mempunyai ajaran sederhana. Negara menjadi baik bila diarahkan pada kepentingan umum, dan sebaliknya negara menjadi buruk bila hanya diarahkan pada kepentingan si penguasa. Ada tiga bentuk negara yang baik, yaitu monarki, aristokrasi, dan *politeia* (semacam demokrasi moderat dengan UUD). Namun, dalam pandangan aristoteles, *politeia*-lah yang paling baik sebab di dalamnya warga kelas menengah bisa bergantian memerintah dan diperintah berturut-turut lewat pemilihan secara periodik; dan dengan demikian, akan ada keseimbangan antara golongan atas dan golongan bawah. Monarki (khususnya monarki dengan filsuf ala Plato) dinilai tidak praktis dan sulit diwujudkan.³⁸ Dan monarki bisa jadi tirani (bentuk penyimpangan monarki, di mana kekuasaan di tangan satu orang dan kekuasaan demi kepentingan pribadi).³⁹ Aristokrasi memang sedikit lebih baik dari pada monarki dan dapat “mengontrol” wewenang atau kekuasaan seorang raja. Bahayanya, aristokrasi bisa jatuh ke dalam oligarki, yakni kekuasaan yang berada hanya pada beberapa (*oligos*) orang. Namun, yang paling berbahaya adalah demokrasi tanpa undang-undang. Di sini, setiap orang mau menjadi penguasa. Akibatnya, muncul situasi anarki (dari kata *a* = tidak, dan *arkhe* = prinsip, asas), situasi kekacauan akibat ketidakjelasan dalam pola kepemimpinan.⁴⁰ Jadi bentuk

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Simon Petrus L. Tjahjadi, *Op. Cit.*, hlm. 75.

³⁹ H. Kabul Budiyono, *Teori Dan Filsafat Ilmu Politik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 89.

⁴⁰ Simon Petrus L. Tjahjadi, *Loc. Cit.*

pemerintahan yang terbaik adalah bentuk pemerintahan yang mampu merealisasikan kepentingan bersama, yakni perwujudan kehidupan yang baik dan bahagia (*eudaimonia*) kehidupan berlandaskan keutamaan (*arete*).⁴¹

2.2.3 Augustinus (354-430 M)

Pemikir pertama yang dengan jelas mengajukan tuntutan legitimasi etis terhadap negara adalah Augustinus. Ia menjadi terkenal sebagai filsuf negara karena tulisannya “*De Civitate Dei*”. Buku ini ditulisnya pada saat kota Roma (410 M) direbut dan dirampok oleh raja bangsa Got Alarich dari Utara. Banyak orang kristen bingung mengapa kekuasaan Roma, sesudah menganut agama Kristen, malah terus merosot dan semakin diancam oleh bangsa-bangsa kasar dari Utara. Berhadapan dengan keluhan itu Augustinus menegaskan bahwa tidak pernah suatu kerajaan duniawi boleh diidentikkan dengan kerajaan Allah.

Augustinus lalu membedakan dua civitas (masyarakat), *civitas Dei* (negara Allah) dan *civitas terrena* (negara duniawi). Negara Allah adalah umat Allah dalam Gereja yang akan mencapai kesempurnaannya pada akhir zaman, sedangkan negara duniawi itulah negara yang akan hancur pada akhir zaman. Keduanya tidak bisa disamakan; bahkan keduanya berlawanan satu sama lain. *Civitas Dei* diciptakan oleh cinta kepada Allah dan anggapan rendah terhadap dirinya sendiri. Sedangkan *civitas terrena* diciptakan oleh cinta kepada dirinya sendiri disertai sikap menghina terhadap Allah.⁴² *Civitas terrena* adalah voanitas (kesia-siaan), dosa, hawa nafsu, keangkuhan, kejahatan, ketidakadilan dan

⁴¹ Martin Suryajaya, *Sejarah Pemikiran Politik Klasik Dari Prasejarah Hingga Abad Ke-4 M*, (Tangerang: Gajah Hidup, 2016), hlm. 203.

⁴² Norbertus Jegalus, *Op. Cit.*, hlm. 47-48.

kecongkakan. *Civitas terrena*, karena itu, disebut juga dengan *civitas diaboli* (kerajaan setan). Sedangkan *civitas dei* (kota Allah) dilukiskan sebagai kehidupan yang diwarnai iman, ketaatan, kasih sayang, kejujuran, keadilan, kebenaran dan segala yang baik.⁴³ *Civitas Dei* tidak memerlukan *civitas terrena*. *Civitas terrena*, negara, sebetulnya merupakan sesuatu yang buruk, namun perlu juga karena manusia oleh dosa asal telah dibuat menjadi egois dan mudah dipermainkan oleh nafsu-nafsunya. Karena kelemahan kesadaran moral manusia itu, maka diperlukan suatu kekuasaan duniawi untuk menertibkannya. Jadi negara bukan tujuan atau nilai pada dirinya sendiri melainkan semata-mata sarana penertiban masyarakat yang masih diperlukan karena manusia pada hakikatnya sendiri buruk sifatnya.

Bagi Augustinus negara secara hakiki bersifat duniawi dan sementara. Fungsinya terbatas pada penertiban manusia pendosa. Bersama dengan dunia ini negara akan hilang. Maka negara jangan dipandang sebagai terlalu penting. Karena itu Augustinus berkata: “Taatilah negara, tetapi hanya sejauh ia tidak menghendaki yang bertentangan dengan kehendak Allah”. Jadi menurut Augustinus: Hak kekuasaan negara ditetapkan dengan tegas. Negara tidak berhak untuk memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan negara hanya dibenarkan sejauh dalam batas-batas kebenaran dan keadilan.⁴⁴

⁴³ Peter Tan, *Paradoks Politik Pertautannya Dengan Agama Dan Kuasa Di Negara Demokrasi*, (Yogyakarta: Gunung Sopai, 2018), hlm. 72.

⁴⁴ Norbertus Jegalus, *Loc. Cit.*

2.2.4 Thomas Aquinas (1225-1274)

Thomas Aquinas tidak dapat diragukan merupakan pemikir Abad Pertengahan di Eropa yang paling besar dan paling berpengaruh sampai hari ini.⁴⁵ Perhatiannya pada bidang kenegaraan dan politik hanya merupakan sebagian kecil dari jangkauan ulasan-ulasannya. Saya membatasi diri pada dua hal yang bagi kita paling relevan: (1) hubungan negara dan hukum kodrat, dan (2) hal tujuan negara.⁴⁶

2.2.4.1 Hubungan Negara Dan Hukum Kodrat

Hukum kodrat adalah hukum dasar moral yang mencerminkan hukum kebijaksanaan Ilahi. Hukum positif sebagai hukum buatan manusia hanyalah sah sejauh berdasarkan hukum kodrat. Jadi, tindakan legislatif negara hanya legitim asal sesuai dengan norma-norma moral.⁴⁷

Inti filsafat negara Thomas Aquinas adalah bahwa eksistensi negara sendiri bersumber pada kodrat manusia. Thomas menolak anggapan Augustinus bahwa negara hanya perlu karena kedosaan manusia. Ia kembali keajaran Yunani klasik bahwa negara berdasarkan suatu kebutuhan kodrat manusia (*physei*). Manusia adalah makhluk sosial (*animal sociale*).⁴⁸

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhannya secara individual. Secara individual, manusia paling-

⁴⁵ Franz Magnis-Suseno, *Op. Cit.*, hlm. 239.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 240.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 241.

paling dapat sekadar mempertahankan nyawanya (*vivere*) tetapi untuk hidup secara baik (*bene vivere*), artinya secara memuaskan, berbudaya dan beradab, manusia memerlukan manusia lain dalam pelbagai tingkatan kelembagaan. Negara adalah lembaga kesosialan manusia paling luas yang berfungsi untuk menjamin agar manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang melampaui kemampuan lingkungan-lingkungan sosial lebih kecil seperti keluarga atau desa dan kota.⁴⁹

2.2.4.2 Tujuan Negara

Thomas mengikat tujuan negara pada tujuan manusia. Apa yang menjadi tujuan manusia? Thomas membedakan tiga tujuan di mana yang pertama masing-masing menunjang yang kemudian. Dua yang pertama telah kita lihat: (1) hidup dalam arti, asal tidak mati (*vivere*). (2) hidup dengan baik (*bene vivere*), artinya sesuai dengan kekayaan kebutuhan manusia yang telah berkembang. Dalam dua tujuan ini, Thomas sekadar mengikuti Aristoteles. Tetapi kalau Aristoteles hanya melihat manusia dalam dimensi kehidupan di dunia (dan oleh karena itu hanya berbicara tentang kebahagiaan di dunia ini), maka Thomas melihat manusia sebagai makhluk yang baru mencapai kebahagiaan yang sebenarnya, apa bila ia diperkenankan memandang Allah, dalam hidup sesudah dunia ini. maka, tujuan terakhir (3) manusia adalah kebahagiaan abadi (*beata vivere*).⁵⁰

Secara konkret, tujuan negara itu dapat diterjemahkan ke dalam tiga tugas pokok. Pertama, negara harus menciptakan perdamaian karena perdamaian adalah

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 242.

unsur terpenting dalam kesejahteraan umum. Tetapi, karena menurut Thomas perdamaian hanya dapat tercapai atas dasar keadilan (karena apabila semua pihak diperlakukan dengan adil, tidak ada alasan sah lagi untuk memperjuangkan suatu perubahan). Tugas pertama negara adalah menciptakan dan menjamin keadilan.⁵¹ Kedua, negara harus menciptakan keadaan yang memungkinkan bahwa masing-masing orang dan anggota masyarakat dapat hidup sesuai dengan hukum kodrat sehingga sesuai dengan tuntutan agar kelak mencapai kebahagiaan abadi. Ketiga, negara harus mengusahakan sarana-sarana material yang dibutuhkan agar dua tugas pertama dapat terlaksana dan masyarakat dapat hidup dengan baik.⁵²

Jadi bagi Thomas, negara adalah realitas yang positif dan rasional. Positif karena sesuai dengan kodrat manusia. Maka, manusia mengakui negara dan bersedia untuk menaatinya. Kalau negara bersifat penindas dan buruk, maka itu bukan karena hakikat negara, melainkan karena negara tidak sesuai dengan tujuannya. Maka, berbeda dengan Augustinus, Thomas membuka kemungkinan untuk memperbaiki negara agar sesuai dengan maksud dan tujuannya yang sebenarnya. Dengan demikian, negara bersifat rasional. Negara tidak ditaati bukan karena orang takut terhadap ancamannya, melainkan karena fungsinya dimengerti dan dengan demikian wewenangnya diakui.⁵³

Sekaligus Thomas menetapkan batas-batas wewenang negara. Negara tidak berwenang karena memiliki kekuasaan, melainkan karena, dan dengan demikian: sejauh, berdasarkan hukum kodrat. Di luar prinsip-prinsip moral dasar

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 243.

⁵² *Ibid.*, hlm. 244.

⁵³ *Ibid.*

yang juga mendasari negara, negara tidak memiliki wewenang. Dengan demikian paham Thomas menyediakan dasar untuk bersifat kritis terhadap negara. Negara tidak ditaati begitu saja, melainkan hanya sejauh negara bertindak dalam batas-batas wewenangnya. Apabila negara memakai kekuatannya untuk memperluas wewenangnya seenaknya, negara kehilangan hak atas ketaatan masyarakat.⁵⁴

2.2.5 John Locke (1632-1704)

John Locke dilahirkan 26 Agustus 1632 dalam suatu keluarga kelas menengah di Wrington, Inggris Barat. Ayahnya adalah seorang tuan tanah dan pengacara. Ia memberikan pengaruh sangat besar pada cara berpikir Locke yang puritan nantinya.⁵⁵ Locke memulai filsafat politik dan hukumnya dengan suatu pertanyaan, apakah kekuasaan politis itu. Karena kekagumannya pada metode empiris yang telah menghasilkan kemajuan teknologi bagi kehidupan manusia, Locke pun menggunakan pendekatan empiris dalam filsafat politiknya. Untuk menjawab pertanyaan itu, Locke terlebih dahulu meneliti proses perkembangan masyarakat, yakni dari keadaan alamiah menuju keadaan perang, dan kemudian terbentuknya negara.⁵⁶

2.2.5.1 Perjanjian Negara

Dalam keadaan alamiah, manusia bebas untuk menentukan dirinya dan menggunakan miliknya dengan tidak tergantung pada kehendak orang lain. Semua manusia juga sama dalam arti bahwa semua memiliki hak yang sama untuk

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Reza Antonius, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 13.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

mempergunakan kemampuan mereka.⁵⁷ Hak dasar terpenting adalah hak atas hidup, hak untuk mempertahankan diri. Dari hak itu, Locke langsung mengembangkan hak atas milik yang dikembangkannya pada pekerjaan. Dengan demikian, manusia dalam keadaan alamiah sebenarnya sudah mengenal hubungan-hubungan sosial.⁵⁸

Tetapi situasi itu berubah sesudah uang diciptakan. Sebelum ada uang, perbedaan kekayaan antara manusia tidak begitu mencolok karena orang tidak akan mengumpulkan lebih daripada apa yang dapat dikonsumsi sendiri. Menurut Locke, ada hukum alam bahwa orang tidak boleh mengambil lebih banyak produk alam dan tanah daripada apa yang diperlukannya demi kebutuhan sendiri.

Dengan penciptaan uang, batas alamiah terhadap akumulasi kekayaan yang berlebihan hilang. Secara ekonomis sekarang masuk akal untuk mengusahakan kekayaan melebihi kemampuan konsumsi karena dapat disimpan dalam bentuk uang. Ketidak samaan alamiah sekarang memainkan peranannya. Mereka yang lebih terampil dan rajin akan menjadi kaya dengan lebih cepat. Dengan sendirinya akan timbul perebutan tanah dan modal. Orang saling mengiri dan memusuhi. Dengan demikian, keadaan alamiah memang semakin menjadi keadaan perang (*state of war*). "Masyarakat yang sekarang dikuasai oleh ekonomi

⁵⁷Franz Magnis-Suseno, *Op. Cit.*, hlm. 273.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 274.

uang, tidak dapat bertahan tanpa pembentukan negara yang akan menjamin milik pribadi”.⁵⁹

Jadi, menurut John Locke, negara didirikan untuk melindungi hak pribadi. Bukan untuk menciptakan kesamaan, atau untuk mengontrol pertumbuhan milik pribadi yang tidak seimbang, melainkan justru untuk tetap menjamin keutuhan milik pribadi yang semakin berbeda-beda besarnya. Memang dengan milik (*properti*) dimaksud bukan hanya barang milik (*estates*), melainkan juga kehidupan (*lives*) dan hak-hak kebebasan (*liberties*). Inilah hak-hak tak terasingkan (*inalienable rights*) dan negara justru didirikan demi untuk melindungi hak-hak asasi itu. Dalam pandangan Locke, manusia yang menjadi warga negara yang mau didirikan itu adalah manusia pemilik.

Uraian Locke tentang perjanjian negara jauh dari jelas. Rupa-rupanya para pelanggar hukum tidak lagi dapat dikontrol. Maka manusia mengadakan *original compact* (perjanjian asali) untuk bersatu dalam suatu masyarakat politik. Paham perjanjian asali itu mempunyai implikasi yang penting. Yang pertama ialah bahwa “kekuasaan politis pemerintahan negara bukan lain hanyalah kekuasaan para warga negara yang bersatu membentuk tubuh politis, kekuasaan mana mereka percayakan kepada orang-orang politis masyarakat”. Jadi segala kekuasaan yang dimiliki negara dimilikinya karena, dan sejauh didelegasikan oleh para warga negara. Motivasi manusia untuk mendirikan negara, yaitu menjamin hak-hak asasinya, terutama miliknya, menjadi tujuan negara. Maka, kewajiban utama negara adalah untuk melindungi kehidupan dan hak milik para warga negara.

⁵⁹ *Ibid.*

Hanya demi tujuan itulah para warga negara meniggalkan kebebasan mereka dalam keadaan alamiah yang penuh ketakutan itu.⁶⁰

2.2.5.2 Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan dalam tiga unsur, yakni (1) *kekuasaan legislatif*, atau kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan ini, yang menurut Locke merupakan kekuasaan tertinggi, dijalankan oleh parlemen yang mewakili golongan kaya dan bangsawan. Dalam hal ini, Locke belum mempunyai pandangan tentang hak atau “kedaulatan rakyat”. Negara diatur oleh pihak-pihak yang karena kekayaannya bisa menyumbangkan sesuatu kepada negara. Dalam membuat undang-undang, kekuasaan legislatif terikat pada tuntutan hukum alam, yakni keharusan untuk menghormati hak asasi manusia sehingga tidak boleh ada peraturan yang sewenang-wenang. Undang-undang harus dibuat demi kesejahteraan umum dan harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. (2) *kekuasaan eksekutif*, yaitu pemerintah yang menjalankan undang-undang, yaitu raja dan stafnya, atau para menteri dan para ksatria. (3) *kekuasaan federatif*, atau kekuasaan yang mengatur tentang masalah-masalah bilateral, seperti mengadakan perjanjian damai, kesepakatan kerja sama, atau menyatakan perang dengan pihak lain atau negara lain. Menurut Locke, adanya pembagian kekuasaan negara ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua manusia mempunyai kedudukan yang

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 275-276.

sama. Tidak ada orang atau kelompok yang berhak untuk memerintah orang lain.⁶¹

2.3 Latar Belakang Intelektual Nicolaus Driyarkara

2.3.1 Thomas Hobbes (1588-1679)

Hobbes adalah seorang Inggris yang bertahun-tahun lamanya hidup dalam pembuangan karena perang saudara yang meletus di tanah airnya. Situasi ini mengakibatkan suatu pandangan pesimistis terhadap wujud manusia, yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatnya tentang negara dan hukum. Di sini Hobbes sangat terkesan oleh ideal humanisme dan ilmu-ilmu pengetahuan. Buku-bukunya yang terpenting adalah: *De Cive*, 1642 (tentang warga negara). *Leviathan or the matter, form and power of a commonwealth, ecclesiastical and civil*, 1651 (Leviathan, atau pokok, bentuk dan kekuasaan suatu hidup bersama, baik gerejani maupun sipil).⁶²

Hobbes merancang negara berdasarkan pengalaman yang dihadapinya saat itu, yakni pergolakan politik di Inggris: persaingan antara raja dan parlemen, pertentangan antara Gereja Anglikan resmi dan puritan, permusuhan antara Inggris dan Irlandia. Semua ini adalah latarbelakang sampai ia berteori tentang negara sebagai lembaga pengancam yang menakutkan orang-orang sehingga melahirkan ketaatan penuh. Hobbes seakan-akan terobsesi oleh pertanyaan: bagaimana masyarakat dapat ditata sedemikian rupa sehingga kekacauan sebagaimana dialaminya sendiri, dapat dielak? Atau: apa sebenarnya hubungan

⁶¹ Simon Petrus L. Tjahjadi, *Op. Cit.*, hlm. 241-242.

⁶² Theo Huijbers, *Op. Cit.*, hlm. 63.

antara negara dan hukum, kekuasaan dan moralitas sehingga masyarakat dapat hidup damai?

Hobbes menyaksikan bahwa perjuangan atas dasar ajaran agama dan moral itu melahirkan kekejaman dan kebengisan antara kubu yang bersaing. Dari kenyataan itu Hobbes menarik dua kesimpulan: *Pertama*, menata masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip normatif, seperti misalnya ajaran agama dan moral, adalah mustahil. Prinsip-prinsip itu hanya dikemukakan sebagai kedok emosi-emosi dan nafsu-nafsu yang paling rendah. *Kedua*, masyarakat hanya dapat ditata dalam perdamaian, kalau pengaruh emosi dan nafsu-nafsu dapat dielakkan. Maka pertanyaan pokok filsafat politik Hobbes adalah: bagaimana masyarakat dapat ditata bebas dari pengaruh emosi dan nafsu-nafsu?

Hobbes lalu mendalami kelakuan manusia. Hasilnya ia temukan bahwa seluruh kelakuan manusia ditentukan oleh satu motivasi, yaitu pada perasaan takut terhadap maut, atau pada naluri untuk mempertahankan nyawa. Karena itu, menurut Hobbes, untuk menertibkan manusia satu-satunya jalan adalah membuat manusia merasa takut. Perasaan takut, dorongan untuk hidup, mengalahkan dorongan lain. Jadi asal saja manusia diancam, maka ia dapat mengontrol emosi-emosi dan nafsu-nafsunya dan membawa dirinya dengan baik. Di sini manusia digambarkan Hobbes sebagai srigala (*homo homini lupus*), dan kondisinya kacau-balau (*bellum omnium contra omnes*).

Maka dirancanglah negara Leviathan. Negara itu harus benar-benar sang Leviathan, yaitu binatang purba raksasa yang mengarungi samudra dengan perkasa tanpa menghiraukan siapa pun. Kekuasaannya mutlak. Negara dalam

menentukan kebijakannya sama sekali berdaulat. Tidak ada kemungkinan untuk melawan negara. Masyarakat tinggal menerima. Atas dasar norma-norma moral dan keadilan pun negara tidak dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena apa yang harus dianggap adil justru ditentukan oleh negara. Maka menurut Hobbes negara tidak dapat bertindak dengan tidak adil, karena apa yang disebut adil ditentukan oleh negara melalui hukum. Demi kesatuan kekuasaan Hobbes juga menolak segala pembagian kekuasaan negara.

Negara Hobbes adalah negara yang mempunyai kehidupan dan kehendak sendiri. Negara itu bagaikan Allah (*Deus Mortalis*). Jadi, ia ada dan memang bisa mati atau bubar. Tetapi selama ia ada maka ia seperti Allah berkuasa mutlak: ia berwenang mutlak untuk menetapkan apa yang baik dan adil, dan terhadap siapa pun negara tidak perlu memberikan pertanggungjawaban.⁶³

Pemikiran Hobbes ini mempengaruhi pemikiran Driyarkara tentang sifat kodrat manusia. Bagi Driyarkara sifat kodrat manusia itu sebagai *Homo Homoni Socius*. Manusia adalah teman bagi sesamanya. Bukan seperti yang dikemukakan oleh Hobbes bahwa manusia itu sebagai "*Homo Homini Lupus*". Ungkapan Driyarkara ini dikemukakannya dalam pandangannya tentang manusia. Menurut keyakinan Driyarkara, pertemanan atau sosialitas itu menjadi lebih nyata lagi dalam pengertian tentang manusia sebagai eksistensial.⁶⁴ Dari pemikiran ini Driyarkara melihat bahwa negara adalah aktivitas kehidupan bersama. Negara ada karena manusia menegara.

⁶³ Norbertus Jegalus, *Op. Cit.*, hlm. 52-54.

⁶⁴ Driyarkara, *Sosialitas Sebagai Eksistensial, Op. Cit.*, hlm. 591.

2.3.2 Karl Jaspers

Bagian yang paling sentral dalam buku filsafat Karl Jaspers (1883-1969) adalah Penerangan eksistensi. Eksistensi ialah yang paling berharga dan paling otentik dalam diri manusia. Eksistensi adalah aku yang sebenarnya, yang bersifat unik dan sama sekali tidak objektif. Eksistensi adalah penghayatan mengenai kebebasan total yang merupakan inti manusia.⁶⁵ Eksistensi dapat dihayati, dapat diterangi melalui refleksi filosofis dan dapat dikomunikasikan dengan orang lain.

Kebebasan berarti memilih, menyadari, mengidentifikasi diri dengan dirinya sendiri. Kebebasan adalah inti kehidupan manusia. Kebebasan dialami sebagai spontanitas dan aktivitas. Karena itu sikap melibatkan diri harus dianggap lebih hakiki bagi eksistensi dari pada sikap teoritis. Sebetulnya, alasan utama untuk melakukan “penerangan eksistensi” tidak lain dari pada mengerti dan menggunakan kebebasan.⁶⁶

Penerangan eksistensi tidak dapat dicapai, kalau saya tidak rela membuka diri untuk orang lain. Eksistensi baru sampai terwujud, jika saya memberanikan diri secara radikal dan tanpa syarat menyerahkan diri kepada orang lain. Hal ini berlangsung dalam “komunikasi”. Komunikasi hanya dapat berlangsung antara eksistensi dan eksistensi. Jaspers melukiskan komunikasi yang sejati sebagai

⁶⁵ K Bertens, *Sejarah Filsafat Kontemporer, Jerman Dan Inggris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 189-190.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 192.

perasaan bahwa sudah dari kekal orang mengenal satu sama lain. Puncaknya terdapat dalam cinta.⁶⁷

Melihat dari pemikiran Jaspers, pemikirannya sejalan dengan Driyarkara tentang dinamika hidup manusia yang merupakan dinamika gerak dan perbuatan. Dinamika itu yang menjadi kunci untuk memahami dinamika persona; subjek yang sadar dengan dirinya sendiri dan subjek yang selalu berbuat, berbuat untuk menampilkan kesiapaannya di dalam dunia ini. Dan oleh Driyarkara, dalam proses mendunia tersebut, manusia sebagai subjek yang sadar mengolah dunia dalam kebudayaan. Salah satu hasil kebudayaan itu adalah struktur dan model kenegaraan, dimana manusia menyatakan, memanusiakan sistem dalam hidup menegara.⁶⁸

2.3.3 Jean Paul Sartre

Jean Paul Sartre lahir di Paris pada tanggal 21 Juni 1905. Ayahnya adalah perwira angkatan laut Prancis dan ibunya, Anne Marie Schweitzer. Ayahnya meninggal dua tahun sesudah kelahiran Sartre. Sartre bersama ibunya pulang ke rumah ayahnya, Charles Schweitzer, di Meudon.⁶⁹ Ketika Sartre berumur sepuluh tahun empat bulan, ia hidup ditengah-tengah orang dewasa, tanpa adik, tanpa teman sebaya. Dunianya adalah perpustakaan kakeknya. Semasa remajanya Sartre termasuk golongan intelektual yang berhaluan kiri.⁷⁰ Sartre meninggal pada

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 193.

⁶⁸ Mudji Sutrisno, *Driyarkara (Filsuf Yang Mengubah Indonesia)*, (Yogyakarta: Galang Press, 2006), hlm. 18-19.

⁶⁹ K. Bertens, *Sejarah Filsafat Kontemporer Prancis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 81.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 83-84.

tanggal 15 april 1980.⁷¹ Bagian filsafat Sartre yang mau dibahas di sini adalah pandangannya tentang relasi-relasi antar manusia.

Dalam relasi antar sesama manusia, subjek yang egoistis selalu melihat yang lain sebagai yang bukan aku. Yang bukan aku dilihat sebagai persoalan. Karena yang lain, pada kenyataannya, adalah yang lain, karena itu, yang lain bukan saya.⁷² Oleh karena itu bagi Sartre, setiap relasi antarmanusia pada dasarnya dapat diasalkan dari konflik. Konflik adalah inti setiap relasi inter-subyektif. Pendapat ini berkaitan erat dengan anggapannya tentang kesadaran. Aktivitas kesadaran yang khas adalah “menidak”. Hal itu berlangsung juga dalam setiap perjumpaan antara kesadaran-kesadaran. Setiap kesadaran mau mempertahankan subyektivitasnya sendiri, mau menjadi pusat suatu “dunia”. Kesadaran lain harus dimasukkan dalam “dunia” itu; atau dengan kata lain harus dijadikan obyek bagi saya, supaya saya tetap merupakan pusat “duniaku”. Tetapi orang lain akan mengusahakan hal yang sama dengan saya; ia pun akan berusaha memasukan saya ke dalam dunianya.⁷³ Dengan demikian setiap perjumpaan antara kesadaran-kesadaran tidak lain daripada suatu dialektika subyek-subyek di mana yang satu berusaha mengalahkan yang menjadi obyek bagi dia.⁷⁴

Sarana yang penting dalam konflik ini adalah sorot mata (*le regard*). Sorot mata ialah Orang lain (*Autrui*) yang menonton saya. Sebuah contoh yang

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 89.

⁷² Felix Baghi, *Alteritas Pengakuan, Hospitalitas, Persahabatan (Etika Politik Dan Posmodernisme)*, (Maumere: Ledalero, 2012), hlm. 25.

⁷³ Ali Mudhofir, *Kamus Filsafat Nilai*, (Jakarta: Yayasan Kartagama, 2014), hlm. 329.

⁷⁴ Norbert Jegalus, *Filsafat Kontemporer*, (Manuskrip), (Kupang: Fakultas Filsafat Agama Universitas Widya Mandira, 2017), hlm. 110.

diberikan Sartre untuk menjelaskan maksudnya sudah menjadi masyhur dan dapat dianggap sebagai salah satu deskripsi fenomenologis yang paling bagus. Analisisnya yang panjang lebar dibebaskan dalam *Ada dan Ketiadaan* kiranya dapat disingkat sebagai berikut. Andaikan saja situasi beriktu ini: saya sedang mengintip pada lobang kunci. Dengan demikian saya adalah subyek. Saya adalah penonton yang seluruhnya terarah kepada tontonan di balik pintu itu. Itulah “duniaku” dan saya adalah pusatnya. Tiba-tiba saya mendengar langkah-langkah di gang. Tak urung saya dipergoki. Saya merasa sorot mata di punggungku: ada orang yang melihat saya. Sorot mata yang membekukan: saya telah menjadi obyek. Bagi orang itu saya merupakan oknum yang sedang membungkuk di depan pintu. Saya termasuk “dunia orang itu” sebagai obyek dengan sifat-sifat tertentu (ingin tahu, kurang sopan).⁷⁵

Pengalaman yang sebenarnya tentang orang lain ialah bahwa saya merupakan obyek bagi dia. Menurut Sartre di bidang relasi-relasi intersubjektif tidak ada kemungkinan lain semua relasi antarmanusiawi beralaskan suatu konflik.⁷⁶ Atau yang lebih jelasnya lagi ialah kebersamaan dalam satu kelompok. Dalam relasi ini saya bersekutu dengan orang lain melawan orang yang ketiga atau kita bersama-sama membuat dia menjadi objek.⁷⁷ Jadi pada hakekatnya relasi-relasi antar manusia adalah konflik: orang lain membuat saya menjadi objek atau saya membuat hal yang sama terhadap orang lain. Akibatnya adalah *alienasi* atau keterasingan. Manusia hanya akan lebih dekat satu dengan yang lain seperti

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 111.

⁷⁷ *Ibid.*

contoh diatas, kalau bergabung melawan orang ketiga, karena dengan demikian akan muncul “kita” yang obyektif. Peperangan, kelaparan dan penindasan kelas biasanya membentuk “kita” itu. Hanya penindasan berlangsung, orang-orang yang tertindas membentuk kesatuan “kita”; sesudahnya kesatuan akan hilang lagi.⁷⁸

Dalam terang eksistensialisme Sartre, kehadiran yang lain (*I' autrui*) dilihat sebagai persoalan bagi kebebasan dan tantangan untuk tanggung jawab pribadi. Persoalan dan tantangan ini tampak dalam tatapan yang lain itu. Yang lain selalu menatap saya. Tatapannya membuat saya merasa tidak aman. Sartre berbicara tentang fenomena selalu ditatap oleh yang lain (*d'etre vu par autrui*). Tatapan yang lain adalah gangguan terhadap kebebasanku.⁷⁹ Maka itu dalam hubungan konkret dengan orang lain saya dapat melakukan dua hal. Saya bisa tunduk kepada orang lain dengan menjadikan saya obyek bagi dia sebagai subyek. Tetapi saya juga bisa mencoba membuat dia menjadi obyek bagi saya sebagai subyek. Inilah yang diusahakan dalam benci, sikap tak acuh, sadisme dan keinginan seksual (*le desir*). Jadi, untuk semua relasi ini dasarnya adalah konflik.⁸⁰

Apa yang dikemukakan Sartre ini mempengaruhi pemikiran Driyarkara. Dalam filsafat manusianya ia mengemukakan sifat kodrat manusia sebagai homo homini socius. Manusia adalah teman bagi sesamanya. Maka manusia senantiasa butuh sahabat dan senantiasa mengembangkan sosialitasnya. Secara eksistensial,

⁷⁸ K Bertens, *Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia*, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 154.

⁷⁹ Felix Baghi, *Op. Cit.*, hlm.26.

⁸⁰ Norbert Jegalus, *Filsafat Kontemporer, Loc. Cit.*

pengalaman manusia akan dirinya yang paling dalam sudah meliputi pengalaman akan orang lain yang mengajak untuk berkomunikasi. Itulah struktur dalam diri manusia. Jadi, struktur eksistensial manusia itu adalah komunikasi dan dengan demikian ia sudah bersifat sosial. Menjadi diri sendiri senantiasa menjadikan orang lain ada.⁸¹ Dari struktur eksistensial manusia (komunikasi) ini yang menciptakan negara. Manusia tidak bernegara melainkan menegara.

2.4 Rangkuman

Pemikiran para filsuf tentang negara dari jaman yunani kuno sampai dengan zaman modern, semua filsuf menulis konsep negara pada zaman mereka. Seperti Plato yang menulis tentang negara pada waktu kehidupan politik yunani merosot. Yang mana ia melihat bahwa pemerintahan negara menjadi rebutan orang-orang yang tidak memenuhi syarat. Karena semua negara terutama pada masa kehidupannya diperintah secara buruk. Untuk itu Plato memikirkan suatu negara yang lebih baik. Untuk menjadi baik Plato mengatakan bahwa masyarakat harus ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan adalah keadaan selaras dan seimbang berbagai tatanan atau lapisan masyarakat. Konsep Plato tentang negara mempunyai satu visi yakni demi kepentingan umum. Bagi mereka yang memerintah harus mengorbankan kepentingan pribadi. Dengan pandangan seperti ini, Plato dapat membangun suatu model negara, baginya dalam negara terdapat tiga golongan yakni; golongan penjamin nefkah, para penjaga, dan para

⁸¹ Driyarkara, *Sosialitas Sebagai Eksistensial, Op. Cit.*, hlm. 593.

pemimpin. Lalu Plato melihat dari ketiga golongan ini, yang patut menjadi pemimpin negara adalah para penjaga.

Aristoteles membahas *polis* dalam rangka tujuan terakhir manusia yakni kebahagiaan (*eudaimonia*), dari kebahagiaan inilah aristoteles melihat bahwa tujuan negara adalah sama dengan tujuan manusia; agar manusia mencapai kebahagiaan. Maka, negara bertugas untuk mengusahakan kebahagiaan para warganya. Bagi Aristoteles negara menjadi baik bila diarahkan pada kepentingan umum, sebaliknya negara menjadi buruk bila hanya diarahkan pada kepentingan si penguasa. Menurutnya ada tiga bentuk negara yang baik yakni *monarki*, *aristokrasi*, dan *politeia*. Bagi aristoteles dari ketiga bentuk negara ini yang paling baik adalah *politeia*. Karena setiap orang bisa bergantian untuk memerintah dan diperintah. Supaya ada keseimbangan antara golongan atas dan golongan bawah.

Augustinus negara secara hakiki bersifat duniawi dan sementara. Fungsinya terbatas pada penertiban manusia pendosa. Baginya negara jangan terlalu dipandang sebagai terlalu penting.

Thomas Aquinas inti filsafat negaranya adalah eksistensi negara sendiri bersumber pada kodrat manusia. Manusia adalah makhluk sosial, maka perlu adanya negara. Negara adalah lembaga kesosialan manusia yang berfungsi untuk menjamin. Thomas melihat ada tiga tujuan negara yakni: negara harus menciptakan dan menjamin keadilan, kedua negara harus menciptakan keadaan yang memungkinkan bahwa masing-masing orang dan anggota masyarakat dapat

hidup sesuai dengan hukum kodrat agar kelak mencapai kebahagiaan abadi, ketiga negara harus mengusahakan sarana-sarana material.

John Locke, negara didirikan untuk melindungi hak pribadi. Bukan untuk menciptakan kesamaan, atau untuk mengontrol hak pribadi yang tidak seimbang, melainkan untuk tetap menjamin keutuhan milik pribadi yang semakin berbeda-beda besarnya. Motivasi manusia untuk mendirikan negara, yaitu menjamin hak-hak dasarnya, terutama miliknya. Hal ini yang menjadi tujuan negara. maka kewajiban negara adalah untuk melindungi kehidupan dan hak milik para warga negara. Untuk itu Locke membagikan kekuasaan dalam tiga unsur yakni *kekuasaan legislatif* atau kekuasaan untuk membuat undang-undang, *kekuasaan eksekutif* pemerintahan yang menjalankan undang-undang, *kekuasaan federatif* atau kekuasaan yang mengatur tentang masalah-masalah bilateral.

Pemikiran para filsuf dari setiap mazhab tentang negara. Semuanya terarah pada realita kehidupan politik yang terjadi pada masa mereka. Semuanya menyatakan bahwa manusia menciptakan negara, dan juga negara berdiri sendiri diluar diri manusia menjadi suatu lembaga tertinggi untuk mengatur dan menjamin kehidupan manusia. Melihat dari para pemikiran filsuf ini, ketika diperhadapkan dengan pemikiran Nicolaus Driyarkara tentang kehidupan negara atau menegara. Beliau lebih banyak berbicara tentang kehidupan negara dari pada bentuk negara sebagai mana banyak dibahas dalam filsafat politik. Seperti pembahasan-pembahasan atau konsep tentang negara yang dikemukakan oleh para filsuf dari jaman yunani kuno sampai dengan jaman modern. Memang kita tidak bisa menghindar dari kehidupan politik negara kita ini. Tidak sehatlah jika

orang memisahkan diri. Tetapi disini kita dapat melihat dengan jelas perbedaannya bahwa Driyarkara tidak membahas bentuk-bentuk negara tetapi ia membahas kehidupan negara. untuk mengerti kehidupan negara pandangan kita harus dinamis tidak boleh statis. Karena negara adalah kehidupan. Jadi yang perlu diketahui bahwa manusia itu tidak bernegara melainkan menegara. Adanya negara karena dan selama manusia menegara.